

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA



BPK RI Beri Tanggapan Atas Opini WTP Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara TA 2012

Manado, Selasa (05/07) – Sehubungan dengan adanya pemberitaan diberbagai media cetak terkait opini WTP yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara *hattrick* atau tiga kali berturut-turut, maka BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara memandang perlu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat selaku pemilik kepentingan (*stakeholders*) BPK RI.

Sesuai dengan amanat Undang-undang, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran (TA) 2012 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada hari Selasa (02/07) lalu. Dalam LHP tersebut, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2012.

Adapun paragraf penjelas yang menyertai opini WTP tersebut, mencakup temuan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum menerapkan penyusutan atas Aset Tetap, sehingga nilai buku Aset Tetap masih menunjukkan nilai yang sama dengan harga perolehannya.
2. Pengeluaran belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang berindikasi kecurangan dan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berakibat pada kekurangan penerimaan sebesar Rp2.020.983.311,00 dan indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp6.087.400.265,00. Kekurangan penerimaan dan indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan dengan penyetoran ke Kas Daerah masing-masing sebesar Rp1.730.715.141,00 dan Rp5.487.902.522,00 sebelum LHP diterbitkan.
3. Penggunaan langsung atas pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dari program Askes dan Jamkesmas yang kejadiannya berulang dari tahun sebelumnya senilai Rp5.669.335.356,18.
4. Pertanggungjawaban penggunaan dana banparpol yang tidak disampaikan kepada pemerintah daerah yang kejadiannya berulang dari tahun sebelumnya senilai Rp241.232.155,00.
5. Terjadi penyalahgunaan dalam pengeluaran belanja jasa medis untuk Jamkesda yang mengakibatkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1.520.160.746,00. Indikasi kerugian daerah ini telah dipulihkan sepenuhnya dengan penyetoran ke Kas Daerah.
6. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum mencatat nilai penyertaan modal pada PD Pembangunan berdasarkan metode ekuitas karena PD Pembangunan belum menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum sehingga pencatatan nilai penyertaan pada PD Pembangunan masih menggunakan metode biaya.

Secara keseluruhan, LHP yang diserahkan tersebut mengungkapkan 53 temuan pemeriksaan, dengan 26 temuan yang merupakan kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan 27 temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekalipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraih opini WTP sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak diraih secara berturut-turut. Berikut gambaran opini Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejak TA 2008-2012.

Tahun Anggaran	Opini atas LKPD
2008	WDP
2009	WTP
2010	WTP-DPP
2011	WDP
2012	WTP-DPP

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa opini WTP diperoleh untuk LKPD TA 2009, 2010, dan 2012. Pada TA 2011, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara gagal mempertahankan opini WTP dan harus turun menjadi WDP.

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara

Contact Person:

I Made Dharma Sugama Putra, S.H., M.M.,
Kepala Subbagian Hukum & Humas
Jl. 17 Agustus No 4 Manado
Telp (0431) 8880205